

**HASIL IDENTIFIKASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN BERUSAHA**

| No. | Jenis Peraturan | Dasar Hukum |
|-----------------------------|--|--|
| Undang-Undang | | |
| 1. | UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UU Dasar 1945 |
| 2. | UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| 3. | UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 |
| 4. | UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A UUD 1945 |
| 5. | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| 6. | UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| 7. | UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| 8. | UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| 9. | UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun | Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), (2), dan (4) UUD 1945 |
| 10. | UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD NRI 1945 |
| 11. | UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945 |
| 12. | UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Pasal 18 UUD NRI 1945 |
| 13. | UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | Pasal 20 dan 21 UUD 1945 |
| Peraturan Pemerintah | | |

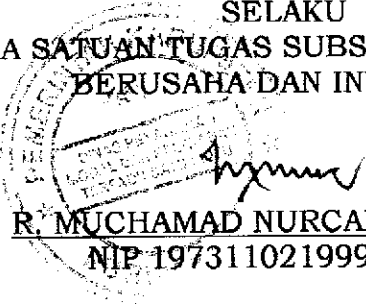
| No. | Jenis Peraturan | Dasar Hukum |
|---------------------------|---|---|
| 14. | PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri | UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian |
| 15. | PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Tidak diatur jelas Pasal pendelegasinya) |
| 16. | PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 ayat 4, Pasal 16 ayat 4, Pasal 37 ayat 8, Pasal 38 ayat 6, Pasal 40, Pasal 41 ayat 3, Pasal 47 ayat 2, Pasal 48 ayat 5, Pasal 48 ayat 6 dan Pasal 64 UU No. 26 Thun 2007 tentang Penataan Ruang. |
| 17. | PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan | Pasal 33, Pasal 41, Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 |
| 18. | PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. |
| 19. | PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian |
| 20. | PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri | Pasal 63 ayat 5 dan Pasal 108 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. |
| 21. | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 | UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang |
| 22. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. |
| Peraturan Presiden | | |
| 23. | Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha | Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 |
| Peraturan Menteri | | |
| 24. | Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung | Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), |

| No. | Jenis Peraturan | Dasar Hukum |
|-----|---|--|
| | | Pasal 40 ayat |
| | | (4), Pasal 41 ayat (7), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 25. | Permenpupera No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung | PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 26. | Permen Pekerjaan Umum No. 06/Prt/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Pasal 28 ayat (5) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 27. | Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 28. | Permen Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL | Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |
| 29. | Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB | UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 30. | Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |

| No. | Jenis Peraturan | Dasar Hukum |
|-------------------------|---|--|
| 31. | Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal | Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 32. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M/Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 | UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan |
| 33. | Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana diubah oleh Permen No. 6/2017 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 34. | Permendagri 19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah | UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
| 35. | Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria |
| 36. | Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah | Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP |
| 37. | Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi | UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA |
| Peraturan Daerah | | |
| 38. | Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan | UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 39. | Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung |
| 40. | Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang |
| Peraturan Bupati | | |

| No. | Jenis Peraturan | Dasar Hukum |
|-----|--|---|
| 41. | Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Untuk Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan | Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan |

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWAKARTA
 SELAKU
 KETUA SATUAN TUGAS SUBSEKTOR PERIZINAN
 BERUSAHA DAN INVESTASI**


R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
NIP 197311021999011001